



BPK Beri Opini WDP

mengatakan untuk TA 2012 telah dilakukan dua tahap pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar. Dari pemeriksaan tersebut laporan keuangan Pemda Kapuas Hulu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Ada pun temuan BPK RI ada 4 temuan kepatuhan dan 5 temuan sistem pengendalian intern. Temuan ini sendiri menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah direvisi berdasarkan laporan temuan BPK RI tersebut barulah diberikan kepada Dewan terhor-mat," ujar Bupati.

Nasir memaparkan sebagai ringkasan dari hasil perhitungan laporan keuangan Pemda Kapuas Hulu TA 2012 yang telah diaudit BPK RI bahwa di dalam struktur APBD terdiri dari tiga komponen pokok yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk total pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 916.490.978.863,53 terealisasi sebesar Rp 915.937.541.307,87 atau 99,93 persen.

Sedangkan total belanja dari anggaran setela perubahan, sam-bung dia Rp 986.929.419.468,74 terealisasi sebesar Rp

925.799.594.290,00 atau 93,80 persen. Sedangkan total pembiayaan Netto dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 70.438.440.605,21 terealisasi sebesar Rp 70.437.527.835,01 atau 99,99 persen.

"Dari perhitungan APBD TA 2012 diketahui sisa lebih perhitungan anggaran berkenaan sebesar Rp 60.575.474.852,88. Ini merupakan selisih antara target dan realisasi pendapatan yang tidak terealisasi sebesar Rp 553.437.555,66, penghematan belanja dan transfer sebesar Rp 57.026.481.232,15 serta pembiayaan sebesar Rp 912.770,20," terang Bupati.

Untuk kegiatan lelang di TA 2012, dikatakan Nasir ada beberapa yang belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan terkendala proses LPSE (Lelang Proyek Se-cara Elektronik) serta kondisi alam yang kurang mendukung.

"Ini juga yang saya lihat membuat serapan dana belum terlalu maksimal. Khusus LPSE jaringan memang susah di Kapuas Hulu. Hal itu akan jadi bahan evaluasi kami. Insya Allah Agustus pembe-nahan jaringan online oleh BPPT dan Pemda Kapuas Hulu sudah dimulai. Ini akan jadi solusi LPSE

kita," jelas Bupati. Sementara itu, Ketua DPRD Ade mengatakan Sidang Paripurna pidato pengantar Bupati Kapuas Hulu atas petanggung jawaban anggaran 2012 ini akan dilanjutkan dengan pemandangan umum DPRD Kapuas Hulu melalui fraksi-fraksi. "Setelah itu ada jawaban dari Bupati dan akan ditindak lanjut kembali, dengan rapat konsultasi," terang dia.

Ade mengatakan, APBD sebelum 31 Desember harus sudah diketok. Paling tidak dalam proses lelang sebagainya sebelum jadwal agenda APBD Perubahan harus sudah dipercepat baik administrasi mau pun pengerr-jaannya. Dari proses lelang ini sendiri akan terus DPRD Kapuas Hulu pantau.

"Kita harap ada perbaikan dari SKPD, pelaksanaannya jangan seperti tahun yang lalu sehingga ada beberapa pengerjaan yang tidak teresap. Jika ada kendala apa pun itu dibahas bersama agar ada solusi. Dari pemandangan umum DPRD hal ini akan kita jadikan poin untuk dikoreksi," tegas Ade.

Reporter: Arman Hainiadi
Editor: Julianus Ratno



Bupati Menyerahkan LKPj APBD 2012 Kepada Ketua DPRD Kapuas Hulu. Arman Hainiadi

PUTUSSIBAU. Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH menyampaik-an Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2012 melalui rapat paripurna di Aula Pertemuan DPRD Kapuas Hulu, Kamis (15/8). Ketua DPRD Kapuas Hulu, Ade M Zulkiffi SAP didampingi Wakil Ketua Agustinus Ding SH memimpin jalannya paripurna tersebut.

Hadir pula Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Achmad Rasyid SH, Dandim 1206/PS, Letkol Inf Jayusman, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Mahyudi Nazriansyah SIK serta dihadiri sebagian besar Anggota DPRD dan Kepala SKPD Kapuas Hulu serta pimpinan instansi vertikal.

Bupati Nasir dalam pidatonya